

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang mempunyai tujuan dalam pembangunan nasional, yaitu masyarakat yang adil dan makmur yang merata baik secara material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan bertitikberatkan pada pembangunan ekonomi tanpa mengesampingkan bidang lainnya.

Pembangunan pada dasarnya merupakan proses multidimensial yang meliputi perubahan struktur sosial, perubahan dalam sikap hidup masyarakat dan perubahan dalam kelembagaan (institusi) nasional. Pembangunan juga meliputi perubahan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan dan pemberantasan kemiskinan. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan, maka pembangunan suatu negara dapat diarahkan pada tiga hal pokok yaitu: meningkatkan ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok bagi masyarakat, meningkatkan standar hidup masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses baik kegiatan ekonomi maupun kegiatan sosial dalam kehidupannya (Todaro, 2004).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan produksi barang dan jasa di suatu negara, seperti penambahan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, penambahan jumlah sekolah, penambahan produksi sektor jasa dan penambahan produksi barang modal (Sukirno, 2011). Secara umum, pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan kapasitas

produksi barang dan jasa dalam suatu wilayah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di wilayah tersebut.

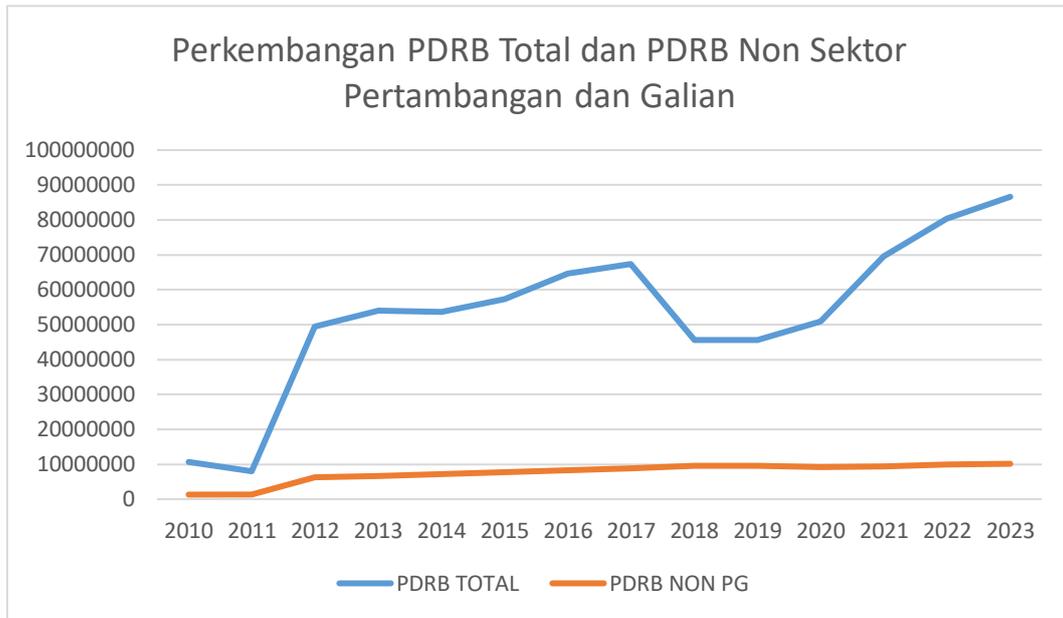
Keberagaman karakteristik daerah mendorong pemerintah pusat melakukan perubahan terhadap kebijakan sentralisasi menjadi desentralisasi yang dicantumkan dalam UU Nomor 22 tahun 1999 diubah menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 dan selanjutnya diubah menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan ini diharapkan dapat mencapai tujuan dalam kemudahan pelayanan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah. Otonomi daerah memberikan kesempatan yang lebih besar kepada setiap daerah untuk mengelola pemerintahan sendiri. Hal ini dapat berdampak baik karena pelayanan dari pemerintah daerah kepada masyarakat menjadi semakin dekat. Dengan berlangsungnya otonomi daerah ini pemerintahan daerah memiliki wewenang lebih besar untuk memenuhi dan mengatur kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah dapat mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri.

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang cukup luas kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola keuangannya sendiri, baik dalam bentuk kegiatan menggali sumber-sumber pendapatan daerah dan menetapkan prioritas anggaran dalam pembangunan daerah. Terdapat dua sumber utama keuangan daerah di masa desentralisasi fiskal; 1) *Intergovernmental transfer*, yakni sumber-sumber penerimaan keuangan yang berasal dari transfer pemerintah pusat ke daerah baik dalam bentuk dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil (pajak dan non pajak); 2) Pendapatan asli daerah yakni sumber-sumber penerimaan daerah yang diperoleh dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. PAD mendorong pertumbuhan ekonomi karena PAD berfungsi sebagai salah satu komponen fiskal pemerintah

daerah dalam pemerataan pembangunan daerah dan pemerataan pendapatan bagi masyarakat setempat sehingga dapat memperlancar kegiatan ekonomi dan konsumsi yang dapat meningkatkan PDRB.

Di Indonesia, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kebijakan dan intervensi yang sesuai dengan potensi dan karakteristik lokal. Kabupaten Mimika, sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Papua Tengah, memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Namun, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mimika sering kali diidentifikasi melalui kontribusi sektor pertambangan, terutama dari keberadaan PT Freeport Indonesia, yang menjadi penopang utama perekonomian daerah ini. Meskipun sektor pertambangan memainkan peran yang dominan, penting untuk melihat sektor-sektor lain yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Fokus utama pada sektor pertambangan dapat menyebabkan ketergantungan ekonomi yang berlebihan, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerentanan ekonomi jika terjadi fluktuasi harga komoditas global atau penurunan produksi.

Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dicerminkan melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah tersebut. Berikut grafik dari pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mimika.



Sumber: BPS (data diolah)

Gambar 1.1 Perkembangan PDRB dan PDRB Non Sektor Pertambangan dan Galian Kabupaten Mimika Atas Dasar Harga Konstan (2010) Tahun 2010-2023

Berdasarkan Gambar 1.1 di atas dapat dilihat bahwa PDRB total di Kabupaten Mimika mengalami fluktuasi yang cukup signifikan selama periode 2010-2023. Pada tahun 2010 hingga 2011, terlihat penurunan tajam. Penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor ekonomi, termasuk penurunan produksi di sektor pertambangan yang dominan di wilayah tersebut. Namun, mulai tahun 2012, terdapat lonjakan besar pada PDRB total, mencapai Rp 49.384.075 juta rupiah, yang diikuti oleh tren peningkatan hingga tahun 2017. Puncak tertinggi terjadi pada tahun 2022, di mana PDRB total mencapai Rp 86.625.494 juta rupiah. Peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, terutama dipicu oleh sektor-sektor utama di Mimika. Berbeda dengan PDRB total, PDRB Non Pertambangan dan Galian menunjukkan tren peningkatan yang lebih stabil. Pada tahun 2009, PDRB Non Pertambangan dan Galian berada pada angka Rp 1.069.924 juta rupiah, dan terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai Rp 10.136.512 juta rupiah pada tahun 2022. Peningkatan ini menandakan

pertumbuhan sektor-sektor lain di luar pertambangan dan galian, seperti sektor pertanian, perdagangan, dan jasa. Meskipun pertumbuhan ini relatif kecil dibandingkan dengan total PDRB, namun tetap menunjukkan adanya diversifikasi ekonomi di Kabupaten Mimika.

Secara keseluruhan, grafik menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan galian masih mendominasi ekonomi Kabupaten Mimika, yang terlihat dari perbedaan besar antara PDRB total dan PDRB Non Pertambangan dan Galian. Namun, pertumbuhan yang stabil pada PDRB Non Pertambangan dan Galian mengindikasikan adanya upaya diversifikasi ekonomi yang sedang berlangsung.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator komposit yang mencakup tiga dimensi utama: harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita. Ketiga dimensi ini mencerminkan pencapaian rata-rata dalam pembangunan manusia, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Dimensi pertama, harapan hidup, mengukur kualitas layanan kesehatan yang diterima oleh masyarakat. Kesehatan yang baik memungkinkan penduduk untuk berpartisipasi secara lebih aktif dalam kegiatan ekonomi, baik di sektor formal maupun informal. Di Kabupaten Mimika, akses terhadap layanan kesehatan masih menjadi tantangan, terutama di wilayah-wilayah yang terpencil. Keterbatasan infrastruktur dan fasilitas kesehatan, serta kurangnya tenaga medis yang terlatih, turut menyumbang pada rendahnya harapan hidup di daerah tersebut. Untuk itu, peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan menjadi prioritas dalam meningkatkan IPM dan, pada akhirnya, mendorong pertumbuhan ekonomi non-pertambangan dan galian. Dimensi kedua, pendidikan, mencakup rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, yang mencerminkan kualitas dan akses pendidikan di suatu daerah. Pendidikan adalah salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi, karena meningkatkan keterampilan dan

produktivitas tenaga kerja. Di Kabupaten Mimika, meskipun ada kemajuan dalam akses pendidikan, kualitas pendidikan masih perlu ditingkatkan. Tingkat putus sekolah yang tinggi dan minimnya fasilitas pendidikan yang memadai, terutama di daerah pedesaan, menjadi kendala yang signifikan.

Rendahnya kualitas pendidikan berdampak langsung pada kemampuan tenaga kerja lokal untuk bersaing di pasar kerja, khususnya di sektor non-pertambangan yang membutuhkan keterampilan khusus. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan merupakan faktor krusial yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan IPM dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dimensi ketiga, pendapatan per kapita, mencerminkan standar hidup masyarakat. Pendapatan yang lebih tinggi biasanya berkorelasi dengan akses yang lebih baik terhadap barang dan jasa, termasuk pendidikan dan kesehatan. Namun, di Kabupaten Mimika, kesenjangan pendapatan antara pekerja di sektor pertambangan dan sektor lainnya sangat mencolok. Penduduk yang bekerja di sektor non-pertambangan seringkali mengalami kesulitan dalam meningkatkan pendapatan mereka, karena keterbatasan akses terhadap peluang ekonomi yang lebih baik. Ketimpangan pendapatan ini menjadi tantangan serius bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan pendapatan per kapita melalui diversifikasi ekonomi dan peningkatan IPM menjadi sangat penting.

Selain IPM, tenaga kerja juga merupakan faktor kunci dalam pertumbuhan ekonomi. Tenaga kerja yang terampil dan produktif adalah aset yang sangat berharga bagi pembangunan ekonomi suatu daerah. Namun, di Mimika, karakteristik tenaga kerja seringkali menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi sektor non-pertambangan. Sebagian besar tenaga kerja di Mimika masih didominasi oleh pekerja dengan tingkat pendidikan yang rendah, yang

menyebabkan rendahnya produktivitas dan daya saing mereka di pasar kerja. Dalam konteks ini, penting untuk mengevaluasi bagaimana kondisi angkatan kerja di Kabupaten Mimika dan bagaimana mereka dapat diberdayakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama di sektor-sektor non-pertambangan.

Pengeluaran pemerintah juga memainkan peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui pengeluaran di berbagai sektor seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah di bidang infrastruktur, misalnya, dapat meningkatkan konektivitas antar daerah, mempermudah distribusi barang dan jasa, serta menarik lebih banyak investasi. Di Kabupaten Mimika, pengeluaran pemerintah telah difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan dan jembatan, serta pada program-program sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pertanyaannya adalah sejauh mana pengeluaran pemerintah ini telah berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, terutama di sektor-sektor selain pertambangan. Analisis yang komprehensif diperlukan untuk memahami dampak dari pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan untuk mengidentifikasi area-area di mana intervensi pemerintah dapat ditingkatkan.

Penelitian ini fokus pada Kabupaten Mimika karena daerah ini menawarkan kasus yang unik untuk dipelajari. Kabupaten Mimika merupakan salah satu daerah yang mengalami ketimpangan ekonomi yang cukup signifikan antara sektor pertambangan dan sektor-sektor lainnya. Sementara sektor pertambangan memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mimika, sektor-sektor lainnya sering kali terabaikan dalam analisis ekonomi. Hal ini dapat menyebabkan ketergantungan ekonomi yang berlebihan

pada sektor pertambangan, yang pada akhirnya dapat membahayakan stabilitas ekonomi daerah dalam jangka panjang. Adapun judul dari penelitian ini, yaitu **“Determinan Pertumbuhan Ekonomi Non Pertambangan dan Galian di Kabupaten Mimika”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui tenaga kerja di Kabupaten Mimika?
2. Apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui tenaga kerja di Kabupaten Mimika?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui tenaga kerja di Kabupaten Mimika.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui tenaga kerja di Kabupaten Mimika.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai bentuk kontribusi dalam studi ilmu ekonomi, khususnya pada studi tentang permasalahan dalam bidang ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mimika.
2. Sebagai sumber referensi empiris, informasi yang diharapkan dapat digunakan dalam mengambil kebijakan serta sebagai jawaban mengenai bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia,

tenaga kerja, dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi non pertambangan dan galian di Kabupaten Mimika.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Konsep Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah kondisi ketika masyarakat suatu wilayah atau negara mengalami peningkatan pendapatan karena adanya kenaikan produksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan aktivitas perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sukirno, 2019). Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Todaro & Smith (2006) berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan proses peningkatan kapasitas produktif dalam suatu perekonomian secara berkelanjutan sepanjang waktu sehingga menghasilkan tingkat pendapatan dan output nasional yang semakin lama semakin besar. Sedangkan menurut Boediono (1999), pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan pendapatan perkapita dalam jangka panjang, dimana persentase pertumbuhan output harus lebih tinggi dari persentase pertambahan jumlah penduduk dan dalam jangka panjang pertumbuhan cenderung akan berlanjut.

Prof. Simon Kuznets (Jhingan, 2013) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang dibutuhkan. Definisi ini memiliki tiga komponen; Pertama, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dilihat dari meningkatnya persediaan barang

secara terus menerus. Kedua, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan tingkat pertumbuhan kemampuan dalam menyediakan aneka macam barang kepada penduduk. Ketiga, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan dapat bermanfaat secara tepat.

Pertumbuhan ekonomi adalah adanya investasi-investasi yang mampu memperbaiki kualitas modal atau sumber daya manusia dan fisik, yang berhasil meningkatkan kuantitas sumber daya produktif, dan yang bisa menaikkan produktivitas seluruh sumber daya melalui penemuan-penemuan baru, inovasi dan kemajuan teknologi Todaro & Smith (2011). Pertumbuhan ekonomi merujuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif (*quantitative change*) dan diukur menggunakan data produk domestik bruto (PDB) atau pendapatan output perkapita. Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dapat menginterpretasikan bagaimana prestasi dan perkembangan ekonomi di daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi penting untuk dihitung setiap tahunnya karena dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan pembangunan ekonomi.

Dalam ilmu ekonomi, ada beberapa cara untuk menghitung pertumbuhan ekonomi, baik dilihat dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran. Dari sisi permintaan (*demand*), yaitu dengan memperhitungkan komponen-komponen makroekonomi berupa konsumsi, investasi, ekspor dan impor. Sedangkan dari sisi penawaran (*supply*) dengan memperhitungkan nilai tambah setiap sektor, yaitu primer, sekunder, dan jasa-jasa (*tersier*) dalam produksi nasional. Indikator untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi digunakan formula sebagai berikut:

$$G_t = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}}$$

Keterangan:

G_t : Pertumbuhan ekonomi periode t

$PDRB_t$: PDRB riil periode t

$PDRB_{t-1}$: PDRB riil periode sebelumnya

Pertumbuhan ekonomi menurut Robert Solow terdapat empat faktor utama produksi, yaitu manusia, teknologi modern, akumulasi modal, dan *output*. Menurut Solow, dalam jangka panjang tingkat tabungan dapat menentukan modal dalam proses produksi. Artinya, semakin tinggi tingkat tabungan, semakin tinggi pula modal dan output yang dihasilkan. Apabila modal dan tenaga kerja dikombinasikan yang berdampak pada pertumbuhan output, maka terjadi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Solow-Swan menggunakan model fungsi produksi yang memungkinkan adanya substitusi antara kapital (K) dan tenaga kerja (L). Tingkat pertumbuhan berasal dari tiga sumber yaitu: akumulasi modal, bertambahnya penawaran tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Teknologi ini terlihat dari peningkatan skill atau kemajuan teknik sehingga produktivitas meningkat.

2.1.2 Teori Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) adalah ukuran statistik komposit yang digunakan untuk menilai tingkat pembangunan manusia di suatu wilayah (UNDP). Indeks ini pertama kali diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 sebagai alat untuk mengevaluasi pencapaian rata-rata suatu negara dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Kesehatan diukur dengan indikator harapan hidup saat lahir, yang mencerminkan panjang usia dan kualitas hidup secara umum. Pendidikan dinilai berdasarkan dua indikator: rata-rata lama sekolah untuk populasi dewasa (25

tahun ke atas) dan harapan lama sekolah untuk anak-anak usia sekolah yang masuk. Standar hidup diwakili oleh Pendapatan Nasional Bruto (GNI) per kapita, yang disesuaikan dengan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity - PPP*).

IPM memberikan gambaran menyeluruh mengenai pembangunan manusia dengan menggabungkan ketiga dimensi ini ke dalam satu indeks tunggal. Skala IPM berkisar dari 0 hingga 1, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat pembangunan manusia yang lebih tinggi. Indeks ini sangat penting karena memberikan perspektif yang lebih luas tentang kesejahteraan manusia daripada hanya mengandalkan ukuran ekonomi seperti Produk Domestik Bruto (PDB). Teori pembangunan manusia yang mendasari IPM berfokus pada gagasan bahwa pembangunan seharusnya dilihat sebagai proses perluasan pilihan dan kesempatan yang tersedia bagi manusia. Salah satu tokoh utama yang mengembangkan pemikiran ini adalah Amartya Sen, seorang ekonom dan filsuf pemenang Nobel. Pada tahun 1999, dalam bukunya *Development as Freedom*, Sen berpendapat bahwa pembangunan tidak semata-mata tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi tentang peningkatan kebebasan manusia untuk mencapai kehidupan yang mereka anggap berharga.

Konsep pembangunan sebagai kebebasan ini menjadi landasan bagi IPM, yang menekankan bahwa kemajuan ekonomi hanyalah salah satu aspek dari pembangunan manusia. Agar pembangunan dianggap berhasil, harus ada perbaikan dalam kesehatan, pendidikan, dan standar hidup secara keseluruhan. Dalam konteks ini, IPM menjadi alat yang relevan untuk menilai keberhasilan pembangunan di luar indikator ekonomi konvensional. Komponen Utama IPM:

a. Harapan Hidup (*Life Expectancy*)

Harapan hidup saat lahir adalah perkiraan rata-rata jumlah tahun yang diharapkan dapat dijalani oleh seseorang sejak lahir, dengan asumsi

bahwa tingkat mortalitas pada saat kelahiran tetap konstan sepanjang hidupnya. Indikator ini mencerminkan kondisi kesehatan umum suatu populasi dan akses mereka terhadap layanan kesehatan. Harapan hidup yang lebih tinggi umumnya menunjukkan sistem kesehatan yang lebih baik dan kualitas hidup yang lebih tinggi. Dalam konteks pembangunan manusia, harapan hidup sangat penting karena kesehatan adalah prasyarat bagi individu untuk menjalani kehidupan yang produktif dan memuaskan. Oleh karena itu, peningkatan harapan hidup sering kali dianggap sebagai salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan manusia.

b. Pendidikan (*Education*)

Pendidikan diukur dengan dua indikator utama: rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun pendidikan formal yang telah diselesaikan oleh orang dewasa berusia 25 tahun ke atas. Indikator ini mencerminkan tingkat pendidikan yang telah dicapai oleh populasi dewasa. Harapan lama sekolah adalah jumlah tahun pendidikan yang diharapkan akan diselesaikan oleh seorang anak usia sekolah yang memasuki sistem pendidikan. Ini mencerminkan aksesibilitas dan kualitas sistem pendidikan di suatu negara. Pendidikan dianggap sebagai salah satu pilar utama pembangunan manusia karena berfungsi sebagai alat untuk memberdayakan individu dan memberikan mereka keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan politik. Selain itu, pendidikan juga berkorelasi dengan berbagai indikator pembangunan lainnya, seperti kesehatan, kesetaraan gender, dan pengurangan kemiskinan.

c. Standar Hidup (*Standard of Living*)

Standar hidup diukur melalui Pendapatan Nasional Bruto (GNI) per kapita yang disesuaikan dengan paritas daya beli (PPP). GNI per kapita mencerminkan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara, termasuk pendapatan dari luar negeri, dibagi dengan jumlah penduduk. Indikator ini memberikan gambaran mengenai daya beli dan kesejahteraan ekonomi rata-rata individu di suatu negara. Standar hidup yang lebih tinggi menunjukkan bahwa penduduk memiliki akses yang lebih baik terhadap kebutuhan dasar, barang, dan jasa yang mendukung kualitas hidup yang baik.

IPM digunakan secara luas sebagai alat untuk merumuskan dan mengevaluasi kebijakan publik. Dengan memberikan ukuran yang lebih komprehensif dari kesejahteraan manusia, IPM memungkinkan pembuat kebijakan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan intervensi lebih lanjut. Sebagai contoh, jika sebuah negara memiliki IPM yang rendah karena harapan hidup yang pendek, kebijakan kesehatan publik mungkin perlu difokuskan pada perbaikan layanan kesehatan dan peningkatan aksesibilitas terhadap fasilitas kesehatan. Demikian pula, jika pendidikan adalah masalah utama, pemerintah mungkin perlu menginvestasikan lebih banyak sumber daya dalam memperbaiki infrastruktur pendidikan dan meningkatkan kualitas pengajaran.

Penggunaan IPM dalam kebijakan pembangunan telah membawa fokus yang lebih besar pada aspek manusia dari pembangunan. Ini mendorong negara-negara untuk tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tetapi juga untuk memperbaiki kondisi sosial dan kesejahteraan penduduk mereka. Sebagai hasilnya, banyak negara telah melihat perbaikan yang signifikan dalam indikator kesehatan, pendidikan, dan pendapatan, yang pada gilirannya telah meningkatkan IPM mereka.

Di Indonesia, IPM telah digunakan sebagai indikator utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Pemerintah Indonesia menggunakan IPM untuk menilai kemajuan pembangunan manusia di berbagai provinsi dan kabupaten, serta untuk mengidentifikasi daerah-daerah yang memerlukan perhatian khusus. Penerapan IPM di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun negara ini telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam pembangunan manusia, tantangan tetap ada. Disparitas antara daerah-daerah maju seperti Jakarta dan daerah-daerah tertinggal seperti Papua menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan untuk mencapai pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah alat yang sangat penting dalam mengukur dan memahami pembangunan manusia. Dengan memberikan pandangan yang lebih holistik tentang kesejahteraan manusia, IPM membantu pembuat kebijakan dan peneliti untuk lebih memahami tantangan yang dihadapi oleh suatu negara atau daerah dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Meskipun memiliki beberapa keterbatasan, IPM tetap menjadi salah satu indikator paling efektif dan banyak digunakan dalam penilaian pembangunan manusia di seluruh dunia.

2.1.3 Teori Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan salah satu elemen fundamental dalam perekonomian yang memiliki peran penting dalam proses produksi dan penciptaan nilai tambah. Secara umum, tenaga kerja dapat didefinisikan sebagai individu-individu yang berada dalam usia produktif dan memiliki kemampuan untuk bekerja, baik di sektor formal maupun informal. Definisi ini mencakup semua orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, baik mereka yang bekerja di perusahaan, menjalankan usaha sendiri, atau bekerja secara temporer. Dalam konteks ekonomi, tenaga kerja

dianggap sebagai salah satu faktor produksi utama, bersama dengan modal, tanah, dan kewirausahaan, yang berkontribusi dalam proses produksi barang dan jasa.

Angkatan kerja (*labour force*) didefinisikan sebagai penduduk yang berada pada usia kerja (15-64 tahun) yang bekerja dan tidak bekerja tetapi siap untuk mencari pekerjaan. Tenaga kerja (*man power*) terdiri dari angkatan kerja (*labour force*) dan bukan angkatan kerja (*non labour force*). Angkatan kerja (*labour force*) adalah penduduk yang mampu dan bersedia melakukan pekerjaan. Mampu disini diartikan mampu secara fisik dan jasmani, kemampuan mental dan secara yuridis mampu serta tidak kehilangan kebebasan untuk memilih dan melakukan pekerjaan serta bersedia secara aktif maupun pasif melakukan dan mencari pekerjaan (Sumarsono, 2004).

Angkatan kerja merupakan salah satu faktor produksi dalam melakukan proses produksi. Dalam proses produksi tenaga kerja memperoleh pendapatan sebagai balas jasa dari usaha yang telah dilakukannya yang biasa disebut dengan upah.

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan penduduk berumur 15 tahun ke atas terbagi sebagai Angkatan Kerja (AK) dan bukan AK. Angkatan kerja dikatakan bekerja bila mereka melakukan pekerjaan atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit satu jam secara berkelanjutan selama seminggu. Sedangkan penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan disebut menganggur. Jumlah angkatan kerja yang bekerja merupakan gambaran kondisi dari lapangan kerja yang tersedia. Semakin bertambah lapangan kerja yang tersedia maka akan semakin meningkat total produksi di suatu daerah.

Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap yang mampu melakukan pekerjaan guna

menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja, sedangkan bukan tenaga kerja merupakan penduduk yang berada di luar usia kerja.

Berdasarkan konsep *The Labour Force Concept* yang direkomendasikan oleh *International Labour Organization (ILO)*, penduduk dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu penduduk yang termasuk usia kerja dan bukan usia kerja. Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja terbagi menjadi dua kelompok, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

a) Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang kegiatan utamanya bekerja dan atau sedang menganggur. Pengangguran atau orang yang menganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan.

b) Bukan Angkatan Kerja

Bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang kegiatannya tidak bekerja maupun tidak mencari pekerjaan. Contohnya, siswa maupun mahasiswa yang kegiatannya belajar, ibu rumah tangga yang kegiatannya mengurus rumah tangga, dan lain sebagainya yang tidak melakukan kegiatan yang dikategorikan bekerja.

Todaro (2000) berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar akan meningkatkan produksi, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestik akan lebih besar.

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah tenaga kerja. Nicholson W (1991) berpendapat bahwa suatu fungsi produksi suatu barang atau jasa adalah $q = f(K, L)$ dimana K merupakan modal (*capital*) dan L adalah tenaga kerja (*labour*). Fungsi tersebut menunjukkan bahwa jumlah maksimal suatu barang/jasa yang dapat diproduksi dengan menggunakan kombinasi alternative antara K dan L maka apabila salah satu input ditambah satu unit tambahan dan input lainnya dianggap tetap akan menyebabkan tambahan output yang dapat diproduksi. Tambahan output yang diproduksi ini disebut dengan *marginal physical product*. Selanjutnya dikatakan bahwa apabila jumlah tenaga kerja ditambah terus menerus sedang faktor lain konstan, pada awalnya akan terjadi peningkatan produktivitas namun pada suatu titik tertentu akan menunjukkan penurunan produktivitas serta setelah mencapai level output maksimum setiap penambahan tenaga kerja akan mengurangi pengeluaran.

2.1.4 Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah pembelanjaan barang-barang modal, barang konsumsi dan jasa-jasa. Pengeluaran pemerintah merupakan penggunaan uang dan sumber daya suatu Negara untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan Negara atau pemerintah guna mewujudkan fungsinya dalam menciptakan kesejahteraan (Pujoalwanto, 2014). Pengeluaran pemerintah merujuk pada semua jenis pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjalankan fungsinya dalam perekonomian. Fungsi ini mencakup penyediaan barang dan jasa public, retribusi pendapatan, serta stabilisasi ekonomi melalui kebijakan fiskal. Pengeluaran pemerintah merupakan seperangkat produk yang dihasilkan yang memuat pilihan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyediakan barang-barang publik dan pelayanan kepada masyarakat. Total pengeluaran pemerintah merupakan penjumlahan keseluruhan dari keputusan

anggaran pada masing-masing tingkatan pemerintahan (pusat-provinsi-daerah). Pada masing-masing tingkatan dalam pemerintahan ini dapat mempunyai keputusan akhir – proses pembuatan yang berbeda dan hanya beberapa hal pemerintah yang di bawahnya dapat dipengaruhi oleh pemerintah yang lebih tinggi (Robert, *et al.*, 1998).

Peran pemerintah sangat penting untuk mengatur jalannya perekonomian agar terciptanya stabilitas pada sistem perekonomian. Secara umum, peranan dan fungsi pemerintah dalam perekonomian dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Fungsi Alokasi

Fungsi alokasi, yaitu mengalokasikan sumber daya yang digunakan dalam memproduksi barang yang berasal dari barang swasta atau barang public. Barang swasta merupakan barang yang ketersediaannya dapat dipenuhi oleh sistem pasar. Barang public merupakan barang yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta seperti prasarana jalan, pertahanan dan lain sebagainya yang pengadaannya disediakan oleh pemerintah.

2. Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi, yaitu peran pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya kepada masyarakat. Distribusi pendapatan atau kekayaan yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk mensejahterahkan rakyatnya. Melalui pemberian subsidi oleh pemerintah secara tidak langsung memengaruhi pendapatan rakyat, yakni melalui kebijakan anggaran seperti subsidi pupuk untuk petani, subsidi BBM, serta subsidi listrik.

3. Fungsi Stabilisasi

Fungsi utama pemerintah, yaitu sebagai stabilisator perekonomian. Pemerintah dapat menstabilkan keadaan ekonomi agar hal-hal yang tidak diinginkan dapat dicegah sehingga tercipta perekonomian yang kondusif dimana inflasi terkendali, sistem keamanan terjamin, dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang memadai.

Keynes berpendapat bahwa untuk menjamin kebutuhan yang stabil pemerintah perlu menerapkan kebijakan fiskal (perpajakan dan belanja pemerintah), kebijakan moneter (tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar), dan pengawasan langsung (Sukirno, 2006). Pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal dimana pada kebijakan fiskal ekonomi suatu negara diarahkan melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Kebijakan fiskal pemerintah dapat memengaruhi tingkat pendapatan nasional, kesempatan kerja, tinggi rendahnya investasi nasional serta distribusi pendapatan nasional.

Pengeluaran pemerintah di Indonesia berperan besar dalam meningkatkan dan mempertahankan pengeluaran agregat serta pertumbuhan ekonomi. Sumber dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah tersebut berasal dari penerimaan dalam negeri dan hibah. Sedangkan pengeluaran pemerintah daerah dibiayai oleh pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah dan dana perimbangan dan pemerintah pusat. Menurut jenis kegiatan berdasarkan Pemendagri No. 13 tahun 2006 Pasal 50, pengeluaran pemerintah daerah dikelompokkan menjadi dua

1. Belanja Langsung

Belanja langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Jenis belanja langsung terdiri dari:

- a. Belanja pegawai, digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah
- b. Belanja barang dan jasa, digunakan untuk pengeluaran dalam bentuk pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- c. Belanja Modal, digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan tau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti tanah, mesin, bangunan, jalan, irigasi dan asset tetap lainnya.

2. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung, yaitu kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Keberadaan belanja tidak langsung bukan merupakan konsekuensi dari ada atau tidaknya suatu program/kegiatan. Belanja jenis ini, pada umumnya dibagi menjadi beberapa jenis yaitu:

- a. Belanja pegawai, belanja pegawai tidak langsung merupakan belanja kompensasi yang diberikan dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Belanja bunga, belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga hutang yang dihitung atas kewajiban pokok

hutang, sesuai dengan perjanjian pinjaman berjangka yang terdiri dari jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

- c. Belanja subsidi, digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan atau lembaga tertentu agar harga jual produksi dan jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
- d. Belanja hibah, digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan jasa kepada pemerintah maupun pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat serta perorangan yang secara spesifik telah memiliki peruntukan yang jelas.
- e. Bantuan sosial, digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan barang kepada masyarakat, dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- f. Belanja bagi hasil, digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Bantuan keuangan, digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan daerah.
- h. Belanja tidak terduga, yaitu tindakan belanja untuk kegiatan yang bersifat tidak biasa atau tidak diharapkan akan terjadi seperti

penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya, yang telah ditutup.

Teori klasik ekonomi, yang dipengaruhi oleh pandangan *laissez-faire*, berpendapat bahwa pengeluaran pemerintah harus diminimalkan. Adam Smith dalam bukunya *The Wealth of Nations* menyarankan bahwa pemerintah memiliki tiga tugas utama: melindungi masyarakat dari kekerasan dan invasi, melindungi setiap anggota masyarakat dari ketidakadilan dan penindasan, dan menyediakan serta memelihara infrastruktur dan institusi publik yang tidak dapat dikelola secara efisien oleh individu. Menurut teori klasik, pengeluaran pemerintah yang berlebihan dianggap dapat mengganggu mekanisme pasar dan menyebabkan inefisiensi ekonomi. Dalam pandangan ini, pemerintah seharusnya tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi selain dari yang telah disebutkan. Pemerintah diharapkan berperan minimal, karena diyakini bahwa pasar dapat mengatur dirinya sendiri melalui mekanisme "tangan tak terlihat." Namun, teori ini mendapat banyak kritik, terutama dari kaum Keynesian, yang memperdebatkan pentingnya intervensi pemerintah dalam perekonomian untuk mengatasi kegagalan pasar.

Teori Keynesian, yang dipelopori oleh John Maynard Keynes, memberikan pandangan yang berbeda mengenai peran pengeluaran pemerintah dalam perekonomian. Keynes memperkenalkan konsep bahwa pengeluaran pemerintah dapat digunakan sebagai alat untuk mengatasi siklus bisnis, terutama dalam situasi resesi atau depresi. Menurut teori Keynesian, pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan permintaan agregat ketika sektor swasta tidak mampu melakukannya. Dalam kondisi ekonomi yang lesu, di mana investasi dan konsumsi swasta menurun, pengeluaran pemerintah dapat berperan sebagai stimulan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi. Keynes berpendapat bahwa dalam jangka

pendek, terutama selama resesi, pengeluaran pemerintah yang ditingkatkan, bahkan jika dibiayai melalui defisit anggaran, dapat mengurangi pengangguran dan meningkatkan output. Pandangan Keynesian ini melahirkan kebijakan fiskal aktif, dimana pemerintah secara aktif menggunakan pengeluaran publik dan perpajakan untuk menstabilkan perekonomian. Pada saat ekonomi sedang dalam kondisi yang buruk, pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sementara pada masa-masa ekonomi *booming*, pemerintah dapat menurunkan pengeluaran atau meningkatkan pajak untuk mengendalikan inflasi.

Teori pembangunan dan pengeluaran pemerintah yang dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. (1) Tahap awal, pada tahap awal perkembangan ekonomi persentase investasi besar, sebab pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi dan sebagainya. (2) Tahap menengah, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun peranan investasi swasta sudah semakin membesar. (3) Tahap lanjut, pembangunan ekonomi dan aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua dan program pelayanan kesehatan masyarakat.

2.2 Keterkaitan Antar Variabel

2.2.1 Hubungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan Ekonomi

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator yang mengukur kualitas hidup suatu populasi berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu kesehatan,

pendidikan, dan standar hidup. Peningkatan IPM menunjukkan adanya perbaikan dalam kualitas hidup masyarakat, yang secara langsung berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Hubungan antara IPM dan pertumbuhan ekonomi ini terlihat jelas dalam berbagai aspek yang saling mendukung. Kesehatan yang baik adalah salah satu komponen penting dalam IPM yang berpengaruh signifikan terhadap produktivitas ekonomi. Ketika masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, tingkat harapan hidup meningkat, dan individu menjadi lebih sehat dan produktif. Populasi yang sehat cenderung memiliki tingkat absensi kerja yang lebih rendah dan mampu berkontribusi lebih lama dalam dunia kerja. Hal ini berujung pada peningkatan output ekonomi karena tenaga kerja yang sehat dapat bekerja lebih efisien dan produktif, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Selain kesehatan, pendidikan merupakan faktor kunci lainnya dalam IPM yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ketika rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah meningkat, lebih banyak individu yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam ekonomi modern. Tenaga kerja yang lebih terdidik mampu berinovasi dan mengadopsi teknologi baru dengan lebih efektif, yang menjadi pendorong utama produktivitas dan daya saing ekonomi. Selain itu, pendidikan yang lebih baik juga memungkinkan individu untuk memperoleh pekerjaan dengan pendapatan yang lebih tinggi, yang kemudian meningkatkan daya beli dan konsumsi dalam perekonomian. Peningkatan dalam konsumsi ini mendorong pertumbuhan ekonomi lebih lanjut melalui peningkatan permintaan akan barang dan jasa.

Standar hidup, yang diukur melalui pendapatan per kapita, juga berperan penting dalam memperkuat hubungan antara IPM dan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pendapatan per kapita tidak hanya mencerminkan kemampuan

ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga mendorong peningkatan konsumsi dan investasi. Ketika standar hidup meningkat, masyarakat memiliki lebih banyak sumber daya untuk diinvestasikan dalam pendidikan dan kesehatan, yang pada gilirannya memperkuat IPM dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, peningkatan dalam IPM tidak hanya mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hubungan searah ini menunjukkan bahwa investasi dalam pembangunan manusia memiliki dampak langsung terhadap perekonomian, dengan menciptakan tenaga kerja yang lebih produktif, inovatif, dan mampu berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, peningkatan IPM dapat dilihat sebagai salah satu strategi utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

2.2.2 Hubungan Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan ekonomi banyak dipengaruhi oleh hubungan antar manusia dengan faktor-faktor produksi yang lain. Dari segi penduduk sebagai faktor produksi, tidak semua penduduk dapat bertindak sebagai faktor produksi. Pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan cepatnya pertumbuhan angkatan kerja. Semakin besar jumlah penduduk usia kerja, maka jumlah angkatan kerja akan bertambah. Hanya penduduk yang berupa tenaga kerja yang dianggap sebagai faktor produksi. Penduduk dalam usia kerja dapat digolongkan menjadi dua yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan penduduk yang belum bekerja, namun siap untuk bekerja atau sedang mencari pekerjaan pada tingkat upah yang berlaku. Penduduk yang bekerja adalah mereka yang melakukan pekerjaan guna

menghasilkan barang dan jasa untuk memperoleh penghasilan, baik yang bekerja penuh maupun yang tidak bekerja penuh.

Tenaga kerja merupakan faktor yang terpenting dalam proses produksi karena tenaga kerja yang akan menggerakkan semua sumber-sumber produksi untuk menghasilkan barang. Kemajuan perekonomian suatu negara tidak terlepas dari produktivitas kerja penduduknya. Adapun produktivitas sendiri harus didukung oleh tingkat investasi dan sumber daya manusia yang memadai. Disamping produktivitas yang tinggi, agar perekonomian suatu negara dapat tumbuh dengan pesat harus didukung adanya efisiensi dalam proses produksinya sehingga memungkinkan bagi perekonomian tersebut untuk memaksimalkan produksinya. Namun jumlah angkatan kerja dan pendidikan tenaga kerja yang tumbuh lebih cepat dari kesempatan kerja akan mengakibatkan pengangguran. Tingginya jumlah pengangguran dapat membawa dampak negatif terhadap perekonomian. Peningkatan dan penurunan dari jumlah tenaga kerja yang diserap oleh sektor perekonomian maka akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Sebab tenaga kerja merupakan sumber daya potensial sebagai penggerak dan juga pelaksana dari pembangunan sehingga nantinya dapat memajukan daerah tersebut.

Perluasan akan kesempatan kerja selain akan memberikan pendapatan sekaligus akan mengurangi tingkat kemiskinan dan mengurangi kesenjangan atas lapisan masyarakat. Sebaliknya jumlah angkatan kerja yang tinggi bila tidak diikuti dengan perluasan kesempatan kerja, otomatis akan menjadi beban bagi pembangunan. Sehingga yang terjadi, yaitu peningkatan angka pengangguran, yang juga akan berpengaruh terhadap pendapatan per kapita suatu masyarakat. Dengan adanya penciptaan kesempatan kerja baru berarti adanya penciptaan pendapatan masyarakat yang akan mendorong *induced investment*, yang pada

akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Secara tidak langsung jumlah angkatan kerja yang bekerja merupakan gambaran kondisi dari lapangan kerja yang tersedia. Semakin besar lapangan kerja yang tersedia maka akan semakin banyak angkatan kerja yang terserap. Dengan terserapnya angkatan kerja maka total produksi di suatu daerah akan meningkat.

Menurut Todaro (2000) penduduk dan pertumbuhan tenaga kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi, sedangkan pertumbuhan penduduk lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar. Dalam keadaan demikian penawaran tenaga kerja mengandung elastisitas yang tinggi. Meningkatnya permintaan atas tenaga kerja (dari sektor tradisional) bersumber pada ekspansi kegiatan sektor modern. Dengan demikian salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah tenaga kerja.

2.2.3 Hubungan Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi

Pengeluaran pemerintah adalah salah satu instrumen utama yang digunakan oleh negara untuk memengaruhi perekonomian. Dengan menggunakan anggaran publik, pemerintah dapat melakukan intervensi dalam perekonomian untuk mencapai berbagai tujuan, seperti stabilitas ekonomi, distribusi kesejahteraan yang lebih merata, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal, yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional (Sukirno, 2000). Pengeluaran pemerintah berupa pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat. Pemerintah mampu memengaruhi tingkat pendapatan keseimbangan

menurut dua cara yang terpisah. Pertama, pembelian pemerintah atas barang dan jasa (G) yang merupakan komponen dari permintaan agregat. Kedua, pajak dan transfer mempengaruhi hubungan antara output dan pendapatan (Y) dan Transfer ke Daerah adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian. pendapatan disposibel (pendapatan bersih yang siap untuk dikonsumsi dan ditabung), yang didapat oleh sektor swasta. Dalam satu pemerintahan kebijakan fiskal diperlukan untuk mengatur jalannya perekonomian. Kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah dalam perekonomian adalah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam hal ini dengan adanya pengeluaran pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung akan mampu mendorong output produksi sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah. Pendapatan dan belanja daerah yang dialokasikan dengan tepat dan efisien tentu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

2.3 Studi Empiris

Abdurrahman, *et. al.* (2023). Penelitian dengan judul "The Effects of Human Development Index and Inflation on Economic Growth in South Sumatra Province". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM) dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan periode 2015-2021. Data dianalisis dengan analisis persamaan linier berganda dengan bantuan program Eviews 9.0. Penelitian ini menganalisis secara parsial bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan. Inflasi secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

di Provinsi Sumatera Selatan. Dan secara simultan indeks pembangunan manusia dan inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan.

Purnamasari, Intan & Amaliah, Ima. (2023). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh IPM, Inflasi dan Akses Internet terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2013-2022. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis model regresi linier berganda. Sampel yang digunakan dalam penelitian merupakan data IPM, inflasi, dan jumlah pengguna akses internet periode 2013-2020. Analisis data menggunakan software E-Views 10. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia, Inflasi dan Akses Internet berpengaruh secara signifikan Pertumbuhan Ekonomi, hal ini dilihat dari probabilitas IPM ($p = 0,0486 < 0,05$), probabilitas Inflasi ($p = 0,0482 < 0,05$), probabilitas Akses Internet ($p = 0,0394 < 0,05$), artinya variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel yaitu IPM, Inflasi, dan Akses Internet berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2013-2022.

Lazuardi, A. S. & Muttaqin, A.A. (2023). Penelitian dengan judul "Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja, IPM, dan IPTIK terhadap Pertumbuhan Ekonomi". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah tenaga kerja, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (IP-TIK) terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Yogyakarta pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2021. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data time series. Model pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda serta uji hipotesis dan uji asumsi klasik. Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang diambil dari BPS untuk data PDRB ADHK di Provinsi Yogyakarta, data tenaga kerja, data IPM, dan data IP-TIK dalam kurun waktu 2012 sampai dengan tahun 2021. Hasil

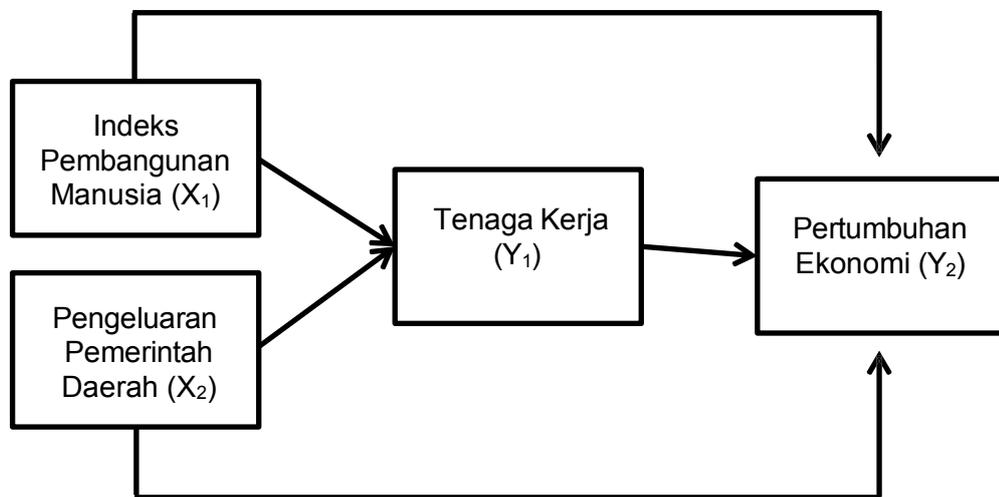
penelitian menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja dan Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2021, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2021.

Isnaini, H. & Sasana, H. (2022). Penelitian dengan judul “Determinan Pertumbuhan Ekonomi di DKI Jakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan jangka pendek dan jangka panjang jumlah tenaga kerja, IPM, inflasi dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi DKI Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah ECM dengan menggunakan data time series dengan periode waktu 1991-2020 atau 30 tahun. Hasil dari penelitian ini adalah jumlah tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta dalam jangka pendek, namun dalam jangka panjang jumlah tenaga kerja berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta. Dalam jangka pendek dan jangka panjang IPM tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta. Inflasi dalam jangka pendek dan jangka panjang tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta. Kemudian investasi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Agustina, E. (2019). Penelitian dengan judul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja, dan Kontribusi Sektor Industri terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah, tenaga kerja, dan kontribusi sektor industry terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2016. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data

sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan DJPK. Analisis data yang digunakan merupakan regresi linier berganda dengan *fixed effect* yang diolah dengan menggunakan Eviews-9. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah dan variabel kontribusi industri pengolahan berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan variabel tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Barat.

2.4 Kerangka Pikir Penelitian



Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir penelitian yang telah dijelaskan dan digambarkan sebelumnya, dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

Hipotesis 1: Diduga indeks pembangunan manusia berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui tenaga kerja.

Hipotesis 2: Diduga pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui tenaga kerja.